



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARDI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NIK : **743869**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 707 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.100.000

1. MOTOR, HONDA E1F02N1 1M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 / NF125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 MT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LONG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.394.080

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 454.494.080

III. HUTANG Rp. 3.288.585

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 451.205.495

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.